

REVIEW PENELITIAN TERKAIT TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS KOPERASI DI INDONESIA

**Widiyanto ¹⁾
Dwi Cahyo Utomo²⁾**

^{1,2)} Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis,
Universitas Diponegoro

¹⁾ widiyanto.karimunjava@gmail.com

²⁾ dcutomo@lecturer.undip.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to examine specifically related to the governance and accountability of cooperatives that have been carried out in Indonesia. This study used a qualitative design, with a population of 125 journals and through purposive sampling, a sample of 35 journals was obtained.

The results of the journal review can be concluded: (1). The trend of research on governance and accountability of cooperatives in Indonesia is mostly done with a qualitative design, obtained the concept: to improve governance can be done through socialization and training on SPI to managers; comply with ethical principles and rules; the accountability aspect must be audited by KAP; the role of government; principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Measurement of the dimensions of democracy, the quality of human resources, transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Good financial planning, transparency and accountability in financial management, increasing management commitment, knowledge, understanding of the duties and authorities of management regarding business risks and communication. Factors of members, administrators and supervisors as well as honesty and understanding; Sharia good corporate governance requires supervision from the Supervisory Board. Understanding of the important role of cooperatives for improving the community's economy, consistency in preparing financial reports. (2). Based on the quantitative design, it is concluded: cooperative governance and accountability have a positive and significant effect and accountability as a mediating variable on cooperative performance, there is no difference between financial accountability performance before and during the pandemic, cooperative reform has a positive and significant effect on cooperative governance and cooperative governance has no effect on the effectiveness of lending.

Keywords : governance, accountability.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkoperasian di Indonesia memperdebatkan adanya paham yang bersifat individualisme dan kapitalisme, namun justru sebaliknya yaitu membangun masyarakat yang berjiwa kolektif. Hal ini terbentuk dari adanya adat istiadat Indonesia murni, yang dikembangkan menjadi lebih kuat seiring dengan



perkembangan zaman seperti saat ini (Baswir, 2019). Selanjutnya, tujuan utama dari badan usaha koperasi tentu saja tidak dimaksudkan berorientasi pada profitabilitas, namun terlebih untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peningkatan kesejahteraan para anggota dengan didasari oleh azas kekeluargaan.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah memperkuat pernyataan di atas. Bahwasannya koperasi merupakan sebuah badan usaha yang anggotanya terdiri dari orang seorang, yang mana dalam praktiknya didasari oleh berbagai prinsip yang ada di dalam badan koperasi.

Koperasi juga telah mendapat pengakuan sebagai salah satu wujud integral di dalam dunia usaha nasional. Sama halnya bagi negara lain, bahwa koperasi merupakan keunggulan kompetitif, namun juga tergantung dari kondisi pasar dan kompetitor. Misalnya : (1). Pada kondisi tidak ada persaingan yang tajam, sehingga menjadikan koperasi tetap mampu bertahan meskipun tidak dijalankan dengan baik. (2). Ada beberapa kompetisi, namun cukup kuat untuk mengalahkan. (3). Terjadi persaingan yang kuat, tetapi pasarnya relatif terbuka dan memiliki kekuatan sendiri. (4). Terjadi persaingan yang ketat dan kehilangan pangsa pasar meskipun memiliki keunggulan (Birchall, 2013).

Salah satu indikator bahwa koperasi di Indonesia berjalan lambat nampak dari perkembangan jumlah anggota yang menunjukkan *trend* yang belum sesuai dengan harapan. Kondisi jumlah anggota yang kurang memiliki perkembangan yang baik, mengindikasikan bahwa minat masyarakat terhadap koperasi menurun.

Disisi lain, menurut PERMENKOP dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi yang mana pada Pasal 10 menyatakan, aspek yang dijadikan pengukuran implementasi akuntabilitas, dan manajemen (peningkatan dan partisipasi anggota, serta aspek manajemen). Jumlah anggota merupakan salah satu tolok ukur kinerja, mengingat sumber pendapatan diantaranya berasal dari simpanan dan pinjaman para anggota itu sendiri.

Rendahnya partisipasi masyarakat ini, berdampak fatal yang mana perkembangan jumlah koperasi di Indonesia menunjukkan geliat yang menurun selama dekade 2012 hingga 2021. Pada tabel 2 nampak bahwa dari 34 provinsi di Indonesia selama 10 tahun terakhir (2012 - 2021) yang mana koperasi aktif relatif berfluktuasi, bahkan cenderung menurun. Penurunan terjadi mulai tahun 2015 sebesar 2,02% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2018 terjadi penurunan yang signifikan jumlah koperasi aktif (dibandingkan tahun 2017) yaitu hingga 16,97%, selanjutnya pada tahun 2019 juga masih mengalami penurunan 2,61%. Peningkatan terjadi pada tahun 2020 namun hanya 3,31% dan turun lagi di tahun 2021 sebesar 0,57%.

Hal tersebut sebagaimana yang telah tertuang ke dalam PERMENKOP dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/IX/2015. Tujuan utama dari peraturan ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 yaitu untuk memberikan dorongan kepada koperasi dalam upaya menumbuhkan pemahaman mengenai pentingnya mengimplementasikan prinsip akuntabilitas untuk membangun kinerja yang lebih baik. Lebih lanjut, Pasal 4 menyebutkan bahwa implementasi akuntabilitas

koperasi, meliputi aspek organisasi dan manajemen, usaha dan pelayanan kepada anggota, serta keuangan. Berdasarkan regulasi tersebut, maka di dalam praktik perkoperasian harus didasarkan pada seluruh prinsip yang dianut dalam koperasi dan tata kelola yang baik.

Tabel 1
Progres Total Anggota Koperasi Di Indonesia

No	Tahun	Total Anggota (Orang)	Perkembangan (%)
1.	2012	33.869.439	
2.	2013	35.258.176	4,10
3.	2014	36.443.953	3,36
4.	2015	37.783.160	3,67
5.	2016	11.842.415	-68,66
6.	2017	18.228.682	53,93
7.	2018	20.049.995	9,99
8.	2019	22.463.738	12,04
9.	2020	25.098.807	11,73
10.	2021	27.100.372	7,97

Sumber : Kementerian Koperasi (2022).

Tabel 2
Data Perkembangan Total Koperasi Aktif di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Koperasi (Unit)	Perkembangan (%)
1	2012	139.321	
2	2013	143.117	2,72
3	2014	147.249	2,89
4	2015	150.223	2,02
5	2016	151.170	0,63
6	2017	152.174	0,66
7	2018	126.343	-16,97
8	2019	123.048	-2,61
9	2020	127.124	3,31
10	2021	127.846	0,57

Sumber : Kementerian Koperasi (2022).

Hal ini juga nampak dari pra survei, berbagai sumber pelacakan jurnal selama 10 tahun terakhir (2013-2022) diperoleh 125 jurnal yang bertema tentang tata kelola dan akuntabilitas serta koperasi. Temuan ini sebagian besar (90 jurnal atau 72%) adalah penelitian yang tidak membahas tentang tata kelola dan akuntabilitas koperasi, dengan demikian hanya 28% dengan penelitian yang secara spesifik membahas tentang tata kelola dan akuntabilitas koperasi.

Terbatasnya penelitian juga terjadi terkait dengan akuntabilitas koperasi yang ada di Indonesia. Temuan dari *review* penelitian terdahulu, misalnya dari Aziz et al. (2015), Aleksovskaja et al. (2019), Grossi et al. (2020), meneliti mengenai akuntabilitas di sektor publik. Selanjutnya, Ortega-Rodríguez et al. (2020) juga melakukan penelitian mengenai akuntabilitas namun juga pada lembaga non koperasi yaitu pada organisasi nirlaba. Sama halnya yang telah dilakukan oleh



Nugrahadi & Basuki (2020) tentang akuntabilitas para pelaku UMKM. Nampak pula bahwa, hasil *review* penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas koperasi yang ada di Indonesia juga belum menjadi fokus perhatian/terbatas.

TELAAH PUSTAKA

Koperasi di Indonesia

Pengertian koperasi tertuang di dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992. Bahwa koperasi merupakan badan usaha dengan keanggotaan terdiri dari orang-seorang atau badan hukum koperasi, yang mana dalam operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi. Sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat didasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi di Indonesia pertama kali diprakarsai oleh Raden Aria Wiri Atmadja pada tahun 1895, dengan nama *De Purwokertosche Hulp en Spaarbank der Ir landsche*. Pada awalnya ini bertujuan untuk menyelamatkan para pegawai pemerintahan dari para rentenir. Selanjutnya pada zaman masa penjajahan Belanda, organisasi ini ditindas oleh *Veror Dening op de Cooperatieve Vereniging*. Hal tersebut merupakan peraturan untuk mengendalikan usaha koperasi dan mencegah tindakan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda (Krisnawati dan Alfiandri, 2019). Kondisi koperasi bisnis memburuk pada masa penjajahan Jepang, karena dijajah dan menguasai sumber daya alam Indonesia. (Krisnawati dan Alfiandri, 2019).

Gambaran koperasi di Indonesia selanjutnya yaitu setelah Indonesia merdeka (pada tahun 1945), gerakan koperasi berubah menjadi Perhimpunan Koperasi Indonesia. Dimana kongres pertama kali pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya dan dideklarasikan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1953, diadakannya kongres kedua dan mengangkat Mohammad Hatta (sebelumnya wakil presiden pertama Indonesia) sebagai bapak koperasi Indonesia (Krisnawati dan Alfiandri, 2019). Berjalannya waktu, pada tahun 1958, pemerintah Indonesia menggugat UU Koperasi No. 79 Tahun 1958 yang mengubah undang-undang perkoperasian Indonesia. Undang-undang ini mendukung koperasi sebagai pionir untuk mendongkrak perekonomian Bangsa yang dalam konteks ini adalah Indonesia.

Upaya untuk meningkatkan kinerja koperasi, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa undang-undang yang mendukung UU Koperasi No. 79 Tahun 1958 seperti PP No. 60 Tahun 1959 yang menyatakan bahwa pemerintah harus terlibat dalam usaha koperasi dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pengurus. Kenyataannya hal ini menjadi bumerang karena koperasi cenderung bergantung pada dukungan pemerintah. Selanjutnya, untuk mengembalikan identitas koperasi, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 14 Tahun 1965, permasalahannya tidak dilaksanakan dengan baik karena adanya campur tangan politik. Intervensi pemerintah juga membatasi koperasi. Kemudian pada tahun 1966, UUD 1945 Pasal 33 dikeluarkan dan mengembalikan fungsi dan identitas koperasi (Krisnawati dan Alfiandri, 2019).

Tujuan dari koperasi juga tertuang di dalam UU No. 25 tahun 1992 pada Pasal 3. Bahwa tujuan dari koperasi yakni menumbuhkan kesejahteraan anggota



dan masyarakat serta turut serta dalam membangun perekonomian nasional bangsa.

Koperasi didirikan untuk melakukan berbagai kegiatan didasarkan pada nilai kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial dan peduli terhadap pihak lain. Selanjutnya, dalam UU No 25 tahun 1992, Pasal 5 mengemukakan 7 (tujuh) prinsip perkoperasian yang ada di Indonesia, sebagaimana dinyatakan berikut : (1) Keanggotaan bersifat suka rela dan keterbukaan. (2) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. (3) Prinsip keadilan di dalam pembagian sisa hasil usaha. (3) Balas jasa yang terbatas terhadap jumlah modal. (4) Bersifat mandiri. (5) Pelaksanaan kependidikan. (6) Adanya kerja sama diantara koperasi.

Pemangku utama di dalam tata kelola koperasi adalah rapat anggota, pengurus dan pengawas koperasi, serta pihak-pihak lain (regulator dan masyarakat luas). Koperasi yang memiliki tata kelola yang baik maka dapat melaksanakan pengelolaan secara transparan, sebagaimana ditegaskan di dalam UU No. 25 tahun 1992.

Tata Kelola Koperasi

Tata kelola merupakan serangkaian proses, tradisi, kebijakan, regulasi dan institusi yang berdampak kepada pengarahan, pengelolaan, serta pengendalian. Selanjutnya, Stamboel (2000) juga mengungkapkan bahwa tata kelola terkait erat dengan pengambilan keputusan didasarkan pada etika dan budaya.

Prinsip tata kelola koperasi terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, interdependensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Masing-masing dinyatakan sebagai berikut (Daniri, 2005) : (1) *Transparency* (keterbukaan) ini terjadi manakala adanya keterbukaan berbagai informasi baik terkait dengan proses maupun pengungkapan informasi material. (2) *Accountability* (akuntabilitas) merupakan kejelasan atas fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban. (3) *Responsibility* (pertanggungjawaban) merupakan bentuk kepatuhan menjalankan prinsip-prinsip koperasi yang sehat. (4) *Interdependency* (kemandirian) merupakan sebuah kondisi di dalam tata kelola tanpa adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan pengaruh/tekanan dari pihak lain yang sekurangnya menuju kepada pelanggaran praktik yang sehat. (5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) merupakan tindakan adil dan setara untuk pemenuhan hak para *stakeholders* yang muncul didasarkan para regulasi terkait.

Koperasi di Indonesia bisa dibidang mengalami pertumbuhan, namun belum mempunyai kinerja yang membanggakan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Permasalahan ini tentu saja menuntut para pihak manajemen koperasi untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan pengelolaan untuk meningkatkan kinerja, mengingat membawa harapan yang besar dari para anggota, (Krisnawati dan Alfiandri, 2019).

Akuntabilitas Koperasi

Akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan sebuah kewajiban dalam pertanggungjawaban atas kinerja dari individu dan/atau badan hukum terhadap pihak yang mempunyai wewenang untuk meminta pertanggungjawaban, (Fattah, 2013).



Menurut PERMENKOP dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/IX/2015 juga mengungkapkan mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas koperasi secara internal merupakan suatu sistem dari pertanggung jawaban yang efektif di dalam badan koperasi, yang tujuannya di dalam pengelolaan dilakukan secara transparan dan penuh tanggung jawab, melalui rapat anggota (Alang et al., 2019).

Alang et al. (2019) mengungkapkan bahwa ciri koperasi yang menganut prinsip operasi yang baik, bersih dan sehat (*good cooperative governance*) sebagai berikut : (1) Terkendali efektif yang mana para anggota mempunyai peran sebagai pemilik dan sekaligus pengguna. (2) Mempunyai acuan pertanggung jawaban yang jelas dan sudah terstandarisasi. (3) Terjadinya transparansi antara segenap pengurus dengan para anggota. (4) Tercipta rasa kepercayaan yang besar dari para anggota bahwasanya koperasi terselenggara dengan sebaik-baiknya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain kualitatif, Pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan metode PICO (*Problem, Intervention, Comparison, Outcome*). Berdasarkan metode ini, maka dari masing-masing jurnal akan dilakukan *review* atas *problem, intervention, comparison, outcome*, sehingga akan diperoleh hasil yang bersifat sistematis.

Data utama dalam konteks ini bersifat data sekunder, berupa berbagai bukti historis yang berhubungan erat dengan penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2018) selama 10 tahun terakhir yaitu tahun 2013-2022.

Populasi dan Sampel

Tabel 3.1
Identifikasi Populasi

No	Identifikasi	Tema		Jumlah
		Koperasi	Non Koperasi	
1.	Objek Penelitian :			
	a. Dalam negeri	63	3	66
	b. Luar Negeri	55	4	59
	Total	118	7	125
2.	Bahasa :			
	a. Indonesia	45	1	46
	b. Inggris	73	6	79
	c. Lainnya	0	0	0
	Total	118	7	125
3.	Grade :			
	a. Nasional	47	2	49
	b. Internasional	71	5	76
	Total	118	7	125

Upaya untuk memperoleh jumlah populasi, digunakan kata kunci (baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris) :

1. Tata kelola koperasi di Indonesia
2. Akuntabilitas koperasi di Indonesia.

Populasi tersebut teridentifikasi seperti nampak pada tabel 3.



Selanjutnya, sampel penelitian ditetapkan berdasarkan teknik *purposive sampling*. Tahap *screening* ini menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi berdasarkan metode PICO. Pada proses ini, secara detail nampak sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Kriteria Inklusi dan Eksklusi Dengan Metode PICO

No	Kriteria	Inklusi	Eksklusi
1.	<i>Problem/ population</i>	Jurnal yang terkait dengan koperasi (non koperasi) baik di dalam maupun di luar negeri.	Jurnal yang tidak terkait koperasi (non koperasi) baik di dalam maupun di luar negeri.
		Jurnal dengan tema penelitian tentang tata kelola dan akuntabilitas koperasi dengan objek penelitian di dalam negeri.	Jurnal dengan tema penelitian tentang tata kelola dan akuntabilitas koperasi namun dengan objek penelitian di luar negeri.
2.	<i>Intervention</i>	Jurnal yang menyertakan abstrak dan kata kunci dengan jelas.	Jurnal yang tidak menyertakan abstrak dan kata kunci dengan jelas.
3.	<i>Comparison</i>	Jurnal dalam bahasa Inggris dan/atau Indonesia.	Jurnal selain menggunakan bahasa Inggris dan/atau Indonesia.
4.	<i>Outcome</i>	Adanya jurnal nasional dan/atau internasional yang mengkaji tentang tata kelola dan akuntabilitas koperasi di Indonesia.	Tidak adanya jurnal nasional dan/atau internasional yang mengkaji tentang tata kelola dan akuntabilitas koperasi di Indonesia.

Berdasarkan proses *screening* maka jumlah sampel dapat diidentifikasi sebagaimana yang nampak di bawah ini :

Tabel 3.3
Jumlah Sampel

No	Eklusi	Jumlah
1.	Populasi	125
2.	Jurnal yang tidak terkait koperasi (non koperasi) baik di dalam maupun di luar negeri.	(7)
3.	Jurnal yang tidak menyertakan abstrak dan kata kunci dengan jelas.	(2)
4.	Jurnal selain menggunakan bahasa Inggris dan/atau Indonesia	(0)
5.	Jurnal dengan tema penelitian tentang koperasi, namun dengan objek penelitian di luar negeri.	(56)
6.	Jurnal yang tidak mengkaji tentang tata kelola dan akuntabilitas koperasi di Indonesia.	(25)
Total Sampel		35

ANALISIS DATA

Kecenderungan Variabel Yang Digunakan Dalam Penelitian Tentang Koperasi

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini, dari 35 jurnal yang sedang dilakukan *review* dalam penelitian diperoleh hasil bahwa menggunakan variabel yang beragam. Hasilnya bahwa, dari 35 jurnal tersebut tidak semuanya melakukan penelitian secara spesifik sehubungan dengan variabel tata kelola dan/atau akuntabilitas koperasi, namun di dalamnya mengandung unsur variabel tata kelola koperasi (*cooperative governance*) dan juga akuntabilitas.

Soebijono et al. (2013), Budiyo & Susilowati (2017), Chandra (2019), Yusma et al. (2021), Muslimah et al. (2021) yang secara khusus meneliti mengenai tata kelola koperasi di Indonesia. Selanjutnya, Sampoerna (2018) lebih spesifik lagi yaitu mengenai tata kelola administrasi keuangan, Hanif et al. (2021) mengkaji tata kelola keuangan koperasi di Indonesia. Selanjutnya, peneliti yang secara spesifik mengkaji tentang akuntabilitas yaitu Jamaluddin (2020), Lestari (2018) dan Winarko (2021) yang secara khusus tentang akuntabilitas laporan keuangan koperasi. Hasil *review* ini dengan demikian hanya 7 (tujuh) jurnal mengkaji secara khusus tentang tata kelola dan hanya 3 (tiga) tentang akuntabilitas. .

Berdasarkan kajian hasil penelitian dari variabel yang digunakan sebagaimana yang dinyatakan di atas, maka kecenderungan hasil penelitian dari variabel yang digunakan mengenai tata kelola dan akuntabilitas koperasi di Indonesia, secara ringkas dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) Akuntabilitas (aspek individu, aspek organisasi, aspek manajemen, aspek usaha, aspek keuangan); (2) Efektivitas; (3) Good cooperative governance atau tata kelola koperasi; (4) Tata kelola koperasi aspek keuangan; (5) Keadilan; (6) Kesejahteraan anggota; (7) Kinerja (kinerja keuangan); (8) Pelayanan anggota; (9) Pembelajaran koperasi; (10) Penerapan akuntansi; (11) Pengembangan bisnis; (12) Praktik pertanian yang baik; (13) Return on asset; (14) SPI; (15) Tanggung jawab; (16) Tingkat kesehatan koperasi; (17) Transparansi; (18) Ukuran koperasi; dan (19) Usia koperasi.

Kecenderungan Konsep Hasil Penelitian Kualitatif

Berdasarkan artikel publikasi penelitian yang diamati, untuk penelitian kualitatif pertama kali dilakukan oleh Soebijono et al. (2013) dengan variabel *good corporate governance* pada Koperasi Pegawai di Surabaya. Konsep yang dihasilkan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa supaya dapat terwujud tata kelola koperasi yang baik, maka harus menganut harus transparan, independ, akuntabel, responsibilitas, kewajaran dan kesetaraan.

Desain kualitatif selajutnya dilakukan oleh Wahyudin et al. (2014) dengan menggunakan variabel SPI dan tata kelola keuangan pada koperasi di Semarang. Hasil ini dapat dinyatakan bahwa dalam pengelolaan laporan keuangan yang baik, di butuhkan adanya sosialisasi dan pelatihan tentang SPI kepada para pengelola koperasi.

Astuti and Lammers (2016) yang menggunakan variabel Pembelajaran koperasi dan akuntabilitas individu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa



sangat dibutuhkan pembelajaran tentang koperasi, yang bertujuan untuk mencapai kompetensi komunikatif.

Satria & Sasmito (2016) dengan desain kualitatif meneliti tentang akuntabilitas dalam praktik pertanian yang baik di dalam koperasi. Konsep yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa akuntabilitas yang rendah dapat menyebabkan produktivitas kerja koperasi juga rendah, pada akhirnya loyalitas anggota juga menurun.

Desain penelitian kualitatif juga dilakukan oleh Yudihartanti et al. (2017), dengan menggunakan variabel penilaian kinerja dan kuantabilitas koperasi organisasi. Hasil ini dapat disimpulkan pola konsep bahwa akuntabilitas koperasi yang rendah dapat berdampak pada informasi capaian kinerja yang sulit untuk diketahui.

Budiyono & Susilowati (2017) melakukan penelitian dengan desain kualitatif tentang tata kelola koperasi. Konsep yang diperoleh dari hasil penelitian ini bahwa tata kelola koperasi yang baik berawal pada adanya etika dan berbagai peraturan yang harus dilaksanakan oleh koperasi. Koperasi dapat melaksanakan pengembangan diri dilakukan dengan mengadopsi model tata kelola koperasi yang baik diantaranya : (1). Landasan ideal, konstitusional, dan operasional. (2). Memenuhi tuntutan yuridis (3). Pedoman *good cooperative governance*, visi misi, sasaran dan mengadopsi *best practices* harus lengkap. (4). Melaksanakan prinsip *beyond the law* (5). Melakukan penyeimbangan *role, rule* dan *relation* antar organ dan unit. Hasil penelitian ini diperoleh konsep bahwa di dalam tata kelola yang baik bisa melakukan adopsi 5 (lima) prinsip etika dan aturan di tersebut.

Wijayanti & Utomo (2017) dalam penelitiannya dilakukan dengan desain kualitatif, dengan menggunakan variabel akuntabilitas baik pada organisasi dan manajemen, usaha dan pelayanan anggota serta keuangan, dan *good corporate governance*. Konsep dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian *good corporate governance* melalui berbagai aspek akuntabilitas, yang terdiri dari aspek organisasi, manajemen, usaha, pelayanan anggota dan keuangan.

Sampoerna (2018) dengan desain kualitatif dan menggunakan variabel tata kelola administrasi dan melalui wawancara diperoleh hasil bahwa KUB di Jurang Mangu Timur sudah melaksanakan perannya dengan baik dan di dalam pemberdayaan komunitas pedagang. Konsep hasil penelitian ini adalah tata kelola koperasi yang tidak optimal, berdampak pada partisipasi anggota yang rendah sehingga pada akhirnya fungsi koperasi menjadi menurun.

Arfaprimasari dan Harindahyani (2018) dengan desain kualitatif dan variabel penelitian pengendalian internal dan *good cooperative governance*. Konsep yang dihasilkan bahwa pengendalian internal yang baik maka berdampak pada *good cooperative governance* yang optimal.

Dasuki (2018) dengan desain kualitatif melakukan penelitian tentang variabel *good cooperative governance*. Konsep dari hasil penelitian ini nampak bahwa tata kelola koperasi yang baik berdampak pada kesinambungan usaha dan melalui peran *stakeholder*.

Lestari (2018) melakukan penelitian dengan desain kualitatif mengkaji tentang variabel *accountability financial statements*. Konsep dari hasil penelitian ini



bahwa pemahaman pengurus tentang SAK ETAP berdampak pada akuntabilitas laporan keuangan.

Nurhadi (2018) dalam penelitian dengan menggunakan desain kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh konsep bahwa pemahaman akuntansi para pengelola berdampak pada akuntabilitas.

Pramesti & Tandio (2018) melakukan penelitian tentang *good corporate governance* dan *transparency* dengan desain kualitatif. Hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* yang baik dapat meningkatkan *good cooperative governance*.

Sungkawati et al. (2018) melakukan penelitian pada Koperasi Wanita di Jawa Timur dengan desain penelitian kualitatif dengan variabel tata kelola yang baik, tanggung jawab dan pengembangan bisnis. Konsep bahwa *good governance* dan tanggung jawab para pengelola berdampak pada perkembangan koperasi dan pada akhirnya kesejahteraan anggota meningkat.

Alang et al. (2019) dengan desain penelitian kualitatif meneliti terkait variabel akuntabilitas manajemen dan organisasi dan pengumpulan data melalui wawancara. Hasil ini diperoleh konsep bahwa kepatuhan terhadap regulasi dapat meningkatkan akuntabilitas manajemen dan organisasi di dalam badan koperasi.

Chandra (2019) juga melakukan penelitian desain kualitatif dengan variabel *good cooperative governance*. Konsep dari hasil penelitian ini bahwa pengelolaan koperasi yang baik dapat diukur dengan menggunakan dimensi demokrasi, kualitas SDM, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran di dalam pengelolaan.

Wuryani & Yanthi (2020) dengan variabel tata kelola perusahaan dan pengendalian internal melalui penelitian kualitatif menyimpulkan bahwa implementasi tata kelola perusahaan pada koperasi perempuan sudah dilaksanakan dengan baik, dilihat dari penilaian kinerja koperasi. Konsep dari penelitian ini bahwa penerapan tata kelola perusahaan pada koperasi melalui pengendalian intern berdampak pada peningkatan kinerja.

Jamaluddin (2020) melakukan penelitian dengan variabel sumber daya manusia dan akuntabilitas melalui desain kualitatif. Konsep dari hasil penelitian ini bahwa pemerintah memegang peran untuk mewujudkan tata kelola koperasi dengan baik.

Finanto & Ismawanto (2020) dalam penelitiannya dengan desain kualitatif pada Koperasi Politeknik Balikpapan mengkaji tentang variabel tata kelola keuangan, akuntabel, komitmen dan prospek. Konsep yang dapat ditarik dari *review* penelitian ini bahwa prospek koperasi dapat ditingkatkan melalui perencanaan keuangan yang baik, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan.

Hanif et al. (2021) dengan desain penelitian kualitatif mengkaji tentang akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian ini dapat dinyatakan ke dalam konsep bahwa pengetahuan pengurus tentang estimasi cadangan kerugian piutang dapat berdampak pada tingkat akuntabilitas laporan keuangan.

Yusma et al. (2021) dalam penelitiannya menggunakan variabel tata kelola koperasi diperoleh hasil bahwa ditemukan adanya penyelewengan wewenang oleh beberapa pengurus dan pengawas, dan juga dari para anggota terbukti banyak

tunggakan yang macet. Hasil penelitian tersebut diperoleh konsep bahwa faktor anggota, pengurus, pengawas, kejujuran dan pemahaman merupakan faktor kunci di dalam pengembangan koperasi yang baik.

Muslimah et al. (2021) yang melakukan penelitian tentang *good corporate governance* dengan desain kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran krusial di dalam tata kelola koperasi syariah. Konsep yang dapat disimpulkan dari hasil *review* ini untuk memaksimalkan *good corporate governance* syariah diperlukan pengawasan dari DPS supaya tercipta transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional dan keadilan.

Yanti et al. (2022) melalui desain kualitatif melakukan penelitian dengan variabel pengelolaan keuangan dan laporan keuangan koperasi. Konsep yang dihasilkan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman pengelola koperasi mengenai berbagai regulasi pemerintah, pemahaman mengenai peran penting koperasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Kecenderungan Hasil Pengujian Penelitian Kuantatif

Berdasarkan hasil *review* terhadap beberapa penelitian terdahulu mengenai tata kelola dan akuntabilitas koperasi di Indonesia dengan menggunakan desain kuantitatif, dapat dirumuskan bahwa akuntabilitas sebagai variabel independen dan mediasi. Variabel yang cenderung sering digunakan sebagai variabel independen terdiri dari transparansi (keterbukaan informasi), akuntabilitas, pertanggung jawaban, kewajaran. Selanjutnya *responsibility*, *indepedency*, *fairness*, ukuran koperasi, umur koperasi, *leverage*, *responsibilitas*, *kewajaran*, *transparency*, *good corporate governance*, kemandirian, kerangka pengendalian internal, tata kelola dan analisis atas risiko keuangan dan reformasi koperasi. Struktur pengendalian internal, analisis risiko keuangan dan reformasi koperasi. Hasil *review* terdapat kecenderungan rumusan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja koperasi.
2. Akuntabilitas memediasi pengaruh ukuran dan umur koperasi terhadap kinerja keuangan koperasi.
3. Tidak ada perbedaan antara kinerja akuntabilitas keuangan sebelum dan saat terjadinya pandemi.
4. Tata kelola koperasi atau *good cooperative governance* berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan.
5. Reformasi koperasi berdampak positif dan signifikan pada tata kelola koperasi.
6. Tata kelola koperasi tidak berdampak pada efektivitas penyaluran kredit.

Kecenderungan Hasil Pengujian Penelitian *Mixed Method*

Berdasarkan hasil *review* jurnal, nampak bahwa dalam penelitian *mixed method* dengan teknik pengumpulan data kuesioner dan wawancara terkait tata kelola koperasi. Nampak mempunyai kecenderungan bahwa tata kelola koperasi yang baik (dapat diukur dengan indeks transparansi, pertanggungjawaban atau *accountable*, tanggung jawab dan kemandirian) dapat meningkatkan kesehatan koperasi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016.



Kecenderungan Konsep Hasil Penelitian R&D

Hasil *review* jurnal penelitian terdahulu dengan desain R&D, Erstiawan & Soebijono (2021) yang melakukan penelitian di Surabaya. Kesimpulan yang diperoleh bahwa : (1). Prinsip transparansi terlaksana dengan baik selama 8 (delapan) tahun terakhir, nampak sudah dilakukan diaudit oleh KAP. (2). Prinsip independensi dilaksanakan dengan baik nampak dalam pengelolaan yang dilaksanakan. (3). Prinsip akuntabilitas dilaksanakan dengan baik (nampak terselenggaranya AD/ART), visi, misi dan tujuan didasarkan dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang disesuaikan dengan kondisi. (4). Prinsip responsibilitas dapat terlaksana dengan baik, nampak telah mentaati Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 merupakan salah satu wujud tanggungjawab pengurus maupun anggota. Prinsip kewajaran dan kesetaraan juga terlaksana dengan baik, nampak tanpa adanya diskriminasi baik dari perspektif suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

Kecenderungan Keterbatasan Penelitian Yang Diungkapkan

Berdasarkan *review* dari 35 jurnal tentang tata kelola dan akuntabilitas koperasi di Indonesia masing-masing menyatakan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan *review* di atas, hanya 6 (enam) yang menyatakan keterbatasan penelitiannya. Keterbatasan tersebut mempunyai kecenderungan tentang :

1. Jumlah sampel
2. Ruang lingkup objek penelitian
3. Instrumen atau metode pengumpulan data
4. Variabel (dependen maupun independen)
5. Kesulitan menemui responden untuk melakukan wawancara dan hasil wawancara terbatas.

Kecenderungan Rekomendasi Penelitian Yang Diungkapkan

Berdasarkan hasil *review* jurnal penelitian tentang tata kelola dan akuntabilitas koperasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan memberikan rekomendasi bagi peneliti yang akan datang supaya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperluas wilayah/objek penelitian.
2. Menambah jumlah sampel.
3. Bagi yang teknik pengumpulan datanya belum menggunakan wawancara maka supaya melakukan wawancara.
4. Menggunakan data sekunder berupa hasil/laporan RAT koperasi untuk memperkuat analisis.
5. Melakukan pengembangan dengan memasukkan koperasi yang kurang aktif sebagai tambahan sampel.
6. Penelitian tentang akuntabilitas koperasi bisa difokuskan pada organisasi, manajemen, administrasi, keuangan, mengukur variabel manajemen risiko tidak hanya dengan rasio BOPO.
7. Meneliti pengaruh penerapan tata kelola terhadap tingkat kesehatan koperasi.

8. Membandingkan penerapan tata kelola melalui pengendalian internal pada koperasi baik yang mempunyai jam operasional tetap dan fleksibel.
9. Menambah variabel peran pemerintah atau regulasi dan persaingan bisnis dan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi implementasi *good cooperative governance*.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil *review* 35 jurnal penelitian terdahulu terkait tata kelola dan akuntabilitas koperasi di Indonesia selama 10 tahun terakhir diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a) Peningkatan tata kelola koperasi (*good cooperative governance*) dapat dilakukan melalui :
 - 1) Pengelolaan koperasi yang transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta adanya kesetaraan dan kewajaran, juga dimensi demokrasi dan kualitas SDM.
 - 2) Pengelolaan perencanaan keuangan yang baik dan komitmen manajemen, adanya pemahaman tugas dan wewenang pengurus tentang risiko bisnis, adanya komunikasi yang baik antar pengurus dan pengawas serta adanya kepercayaan anggota kepada pengurus.
 - 3) *Good corporate governance* syariah diperlukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- b) Tata kelola koperasi atau *good cooperative governance* yang tidak optimal berdampak pada partisipasi anggota yang rendah sehingga pada akhirnya fungsi koperasi menjadi menurun, ketidakberlanjutan usaha, perkembangan koperasi dan kesejahteraan anggota yang tidak meningkat.
- c) Peningkatan akuntabilitas koperasi dapat dilakukan melalui :
 - 1) Pembelajaran tentang koperasi kepada para pengelola koperasi,
 - 2) Pemahaman pengurus koperasi tentang SAK ETAP dan akuntansi,
 - 3) Kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.
- d) Akuntabilitas yang rendah dapat menyebabkan produktivitas kerja koperasi rendah, loyalitas anggota menurun dan informasi capaian kinerja sulit diketahui.

Keterbatasan Penelitian

- a) Pelacakan jurnal dari berbagai sumber telah dilakukan, namun khusus mengenai tata kelola dan akuntabilitas koperasi di Indonesia selama 10 tahun terakhir sulit diperoleh dari sumber yang bereputasi.
- b) Penelitian ini hanya terpusat pada tata kelola dan akuntabilitas koperasi di Indonesia, sehingga mempunyai ruang lingkup yang sempit.
- c) Berdasarkan keterbatasan pada point 1 dan 2, maka menjadikan sampel penelitian menjadi sedikit (35 jurnal).

Rekomendasi Untuk Peneliti Mendatang

Berdasarkan keterbatasan di atas, nampak bahwa penelitian tentang koperasi di Indonesia masih jarang dilakukan khususnya mengenai variabel tata



kelola dan akuntabilitas. Sehubungan dengan hal ini, maka penelitian lebih lanjut misalnya :

1. Melakukan pengujian pada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tata kelola dan akuntabilitas koperasi.
2. Penelitian mengenai implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. Penelitian mengenai pengetahuan para pengurus dan pengawas tentang tata kelola dan akuntabilitas koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Tapanjeh, A. M. (2009). Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on Accounting*, 20(5), 556–567.
- Ahmad, S., & Omar, R. (2016). Basic corporate governance models: a systematic review. *International Journal of Law and Management*, 58(1), 73–107. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-10-2014-0057>
- Alang, J. A., Sauw, H. M., & Bire, A. R. (2019). Implementasi akuntabilitas penyelenggaraan organisasi dan manajemen bagi koperasi serba usaha Tunas Mandiri di Kupang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 4(1), 19–23.
- Aleksovska, M., Schillemans, T., & Grimmelikhuijsen, S. (2019). Lessons from five decades of experimental and behavioral research on accountability: A systematic literature review. *Journal of Behavioral Public Administration*, 2(2), 1–18. <https://doi.org/10.30636/jbpa.22.66>
- Anggraini, D., & Violita, E. S. (2017). *Analysis of Implementation of Cooperatives Governance and the Level of Health of Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. 55(Iac 2017), 87–92. <https://doi.org/10.2991/iac-17.2018.16>
- Ansharullah. (2013). Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan. *Pekanbaru: Cadas Press*.
- Awino Mary, A. (2014). a Survey of Corporate Governance Practices By Savings and. *International Journal of Management Research & Review*, 4(5), 583–600.
- Ayu, I. G., Asri, M., & Putri, D. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Pekreditan Desa Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(3), 586–598.
- Aziz, M. A. A., Rahman, H. A., Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. *Procedia Economics and Finance*, 28(April), 163–169. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01096-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01096-5)
- Babalola, A. (2014). Corporate Governance and Cooperative Societies : A Survey of Tertiary Institutions in Oyo , Nigeria. *Developing Country Studies*, 4(12), 8–18.
- Baswir, R. (2019). *Koperasi Platform Agenda Perjuangan Koperasi di Era Digital. Seminar Koperasi Platform. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.* <https://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/314/2019/07/Materi-Dr-Revrisond-Baswir-MBA-FEB-UGM-Koperasi-Platform>.



- Birchall, J. (2013). The potential of co-operatives during the current recession; theorizing comparative advantage. *Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.5947/jeod.2013.001>
- Budiyono, T., & Christina Indah Maya Susilowati. (2017). Tata kelola Koperasi di Salatiga. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 257–266.
- Catriana, E. (2020). Tantangan Koperasi Di Indonesia, Persaingan Hingga Masalah Pengelolaan. *Diunduh: 25 Februari 2022. <https://Money.Kompas.Com/Read/2020/08/13/143900426/Tantangan-Koperasi-Di-Indonesia-Persaingan-Hingga-Masalah-Pengelolaan?Page=all>*
- Chandra, A. (2019). DIMensi Good Cooperative Governance Koperasi Konvensional Dan Koperasi Syariah Di Pekanbaru Ade. *Jurnal Al-Amwal Vol. 8, No. 2, 52(1)*, 1–5.
- Daniri, M. A. (2005). *Good corporate governance: konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia*. Ray Indonesia.
- Dasuki, R. E. (2018a). Kajian Good Corporate Governance Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Study and Management Research*, 15(1), 53. <https://doi.org/10.55916/smart.v15i1.9>
- Dasuki, R. E. (2018b). Kajian Good Corporate Governance Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah. *Frima 2018 (Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi)" Resolusi Bisnis Era Digital"*, 1, 739–755.
- Endar Susianto, T., & Suyanto, S. (2013). Bukti Empiris Penerapan Prinsip-Prinsip Good Cooperative Governance pada Kinerja Koperasi di Sukabumi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 1(02), 225–237. <https://doi.org/10.35838/jrap.v1i02.81>
- Erstiawan, M. S., & Soebijono, T. (2021). Analisis Good Corporate Governance Pada Koperasi (Pendekatan Sistem Informasi Studi Kasus Koperasi Setia Bhakti Wanita di Surabaya). *Develop*, 2(1). <https://doi.org/10.25139/dev.v2i1.959>
- Fattah, N. (2013). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, h. 159. 1 1*.
- Finanto, H., & Ismawanto, T. (2020a). Analisis identifikasi permasalahan koperasi politeknik balikpapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota. *Akuntabel*, 17(2), 253–260.
- Finanto, H., & Ismawanto, T. (2020b). Analisis identifikasi permasalahan koperasi politeknik balikpapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota. *Jurnal Akuntabel*, 17(2), 253–260.
- Grossi, G., Kallio, K. M., Sargiacomo, M., & Skoog, M. (2020). Accounting, performance management systems and accountability changes in knowledge-intensive public organizations: A literature review and research agenda. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(1), 256–280. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-02-2019-3869>
- Hall, A. T., Frink, D. D., & Buckley, M. R. (2017). An accountability account: A review and synthesis of the theoretical and empirical research on felt accountability. *Journal of Organizational Behavior*, 38(2), 204–224. <https://doi.org/10.1002/job.2052>
- Hanif, A., Rini, D. D. O., & Eviyanti, A. (2021). Pendampingan Tata Kelola



- Keuangan pada Koperasi Dinar Amanta di Era Pandemi Covid 19. *Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri Pengabdian Masyarakat Di Era New Normal Prosiding*, 2(2), 56–60.
- Hariyati, S., & BZ, F. S. (2020). Pengaruh Struktur Pengendalian Internal, Tata Kelola Dan Analisis Risiko Keuangan Terhadap Efektivitas Penyaluran Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 551–559. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.15887>
- IAPI. (2016). SA 200.pdf. In *Standar Profesional Akuntan Publik*. [http://spap.iapi.or.id/1/files/SA 200/SA 200.pdf](http://spap.iapi.or.id/1/files/SA%200/SA%200.pdf)
- Jamaluddin, Yuniar, L. S., & Zainuddin, S. (2020). Penguatan pengelolaan koperasi melalui pembinaan laporan keuangan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(November), 88–94.
- Jaswadi, J. (2017). Analisis tingkat implementasi good corporate governance pada usaha kecil dan menengah. *Jurnal Siasat Bisnis*, 20(2), 161–180. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol20.iss2.art5>
- Jayne C Lammers, P. A. (2016). Individual Accountability in Cooperative Learning : *Indonesian Journal of Applied Linguistics, Vol. 7 No. 1, May 2017, Pp. 215-228 Learning*, 7(1), 215–229.
- Khafid, M., & Nurlaili, D. (2017). The mediating role of accountability in the influence of cooperative characteristics on its financial performance. *International Journal of Economic Research*, 14(5), 191–200.
- Krisnawati, N. (2019). Assessment Of Factors Affecting Cooperat Ives ' Performance In Indonesia : The Case Of Credit Union Cooperatives Nila Krisnawati ; Alfiandri Introduction Cooperatives (Koperasi) are a community-based organisation that aims to gather resources for develo. *Journal of Entrepreneurship, Business and Economics*, 7(2), 80–105.
- Kusuma putra, M., & Cipta, W. (2021). Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko pada Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 451. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i2.36371>
- Lestari, B. A. H. (2018). Akuntabilitas Koperasi Melalui Laporan Keuangan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(1), 048–066. <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i1.34>
- Luo, J., Han, H., Jia, F., & Dong, H. (2020). Agricultural Co-operatives in the western world: A bibliometric analysis. *Journal of Cleaner Production*, 273, 122945. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122945>
- Marini, A. (2008). Ekonomi dan Sumber Daya. *Jakarta: Pengembangan Depdiknas*.
- Marlina, E. (2019). Pengaruh Good Cooperative Governance Terhadap Kinerja Koperasi di Kota Pekanbaru , Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 11–21.
- Marsa, K., Putra, K., & Cipta, W. (2021). Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko pada Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng. 12(November), 451–459.
- McKillop, D., French, D., Quinn, B., Sobiech, A. L., & Wilson, J. O. S. (2020). Cooperative financial institutions: A review of the literature. *International Review of Financial Analysis*, 71(December 2019).



- <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101520>
- Muslimah, J., Andani, M. A., Rahmawati, N. T., Izza, N., Putri, K., Sari, M., Tinggi, S., Syariah, E., & Village, I. (2021). *El-Ujrah : [Journal Of Islamic Banking And Finance] Urgensi Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Koperasi Syariah Benteng El-Ujrah : [Journal Of Islamic Banking And Finance]*. 01, 1–11.
- Muslimah, J., Andani, M. A., Rahmawati, N. T., Izza, N., Putri, M. K., Afidah, P. ayu I., & Sari, M. (2021). Urgensi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Koperasi Syariah Benteng El-Ujrah : [Journal of Islamic Banking and Finance]. *El-Ujrah : Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 1–11.
- Mwesigwa Rogers, Nasiima Centrine, Suubi, S. (2014). Corporate Governance , Managerial Competences , Accountability and Financial Performance of Commercial Banks in Uganda. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, II(9), 1–15.
- Nino. (2021). Tahun Berbenah Koperasi dan UMKM. *Diunduh : 03 Maret 2022*. <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2021/12/31/tahun-berbenah-koperasi-dan-umkm/>, 8.5.2017, 2003–2005.
- Nugrahadi, E. W., & Basuki, B. (n.d.). Studi Akuntabilitas Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Koperasi Dan Dinas Perindustrian Kabupaten Lamongan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 33–44.
- Nurhadi. (2018). Pengaruh Penerapan Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Koperasi Di Kota Palu. *Jurnal Sinar Manajemen*, 5(1), 51–56.
- Olomy, C. C. (2015). *An Investigation of Relationship Between Corporate Governance and Financial Performance of Savings and Credit Cooperative Societies: A Case of Tanga Region*. 1–59.
- Ortega-Rodríguez, C., Licerán-Gutiérrez, A., & Moreno-Albarracín, A. L. (2020). Transparency as a key element in accountability in non-profit organizations: A systematic literature review. *Sustainability (Switzerland)*, 12(14). <https://doi.org/10.3390/su12145834>
- Pengembangan, D. B., & Manusia, S. D. (2010). *Struktur organisasi koperasi*.
- Pradnyaswari, L., & Putri, I. (2016). Pengaruh prinsip-prinsip good corporate governance pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1064–1091.
- Pramesti, G. A. A., & Tandio, D. R. (2018). ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KOPERASI DI KOTA DENPASAR. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 8(2), 55–64.
- Prawira, A., & Laila, Y. (2020). *Kontribusi Koperasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. 148, 148–162.
- Puspita, E., & Winarko, S. P. (2021). Analisis Akuntabilitas Keuangan Sakti Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 6(2), 118–134.
- Rahayu, N. (2018). Koperasi Diminta Mulai Terapkan Good Cooperative Governance. *Diunduh : 13 Februari 2022*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read205641/koperasi-diminta-mulai->



- Terapkan-Good-Cooperative-Governance.*
- Rasel, M. A., & Win, S. (2020). Microfinance governance: a systematic review and future research directions. *Journal of Economic Studies*, 47(7), 1811–1847. <https://doi.org/10.1108/JES-03-2019-0109>
- Rosmayati, S. (2022). *Reformasi Koperasi Terhadap Corporate Governance Pada Koperasi Simpan Pinjam*. 87–96.
- Sabbaghi, O. (2016). Corporate governance in China: a review. *Corporate Governance (Bingley)*, 16(5), 866–882. <https://doi.org/10.1108/CG-12-2015-0162>
- Sampoerna, D. (2018a). *Pembinaan Tata kelola Administrasi Keuangan Usaha Anggota Koperasi Maju Bersama di Kelurahan Jurang Mangu Timur , Pondok Aren – Tangerang Selatan*. 2(2), 14–25.
- Sampoerna, D. (2018b). Pembinaan Tata kelola Administrasi Keuangan Usaha Anggota Koperasi Maju Bersama di Kelurahan Jurang Mangu Timur , Pondok Aren – Tangerang Selatan. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian ...*, 2(2), 14–25. <http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/PAMAS/article/view/398>
- Satria, A. T., & Sasmito, C. (2016a). Akuntabilitas Pelayanan Koperasi Terhadap Produktivitas Susu Segar KUD Dau Kabupaten Malang. *Reformasi*, 6(1), 34–38.
- Satria, A. T., & Sasmito, C. (2016b). Akuntabilitas Pelayanan Koperasi Terhadap Produktivitas Susu Segar KUD Dau Kabupaten Malang. *Reformasi*, 6(1).
- Sheilla Erdini Arfaprimasari, S. H. (2018). Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.7 No.2. *Calyptra*, 2(2), 1–12.
- Soebijono, T., Erstiawan, M. S., & Binawati, L. (2013). Analisis Good Corporate Governance Pada Koperasi. *BIP's Jurnal Bisnis Perspektif*, 9(1), 10–27. <https://doi.org/10.37477/bip.v9i1.42>
- Stamboel, K. A. (2000). Good Corporate Governance: Menyeimbangkan Antara Kinerja Perusahaan dengan ketaatan. *Makalah, Jakarta: The Indonesian Institute for Corporate Governance*.
- Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian dan Evaluasi Kualitatif. *Alfabeta*, 978-602-289-471-1.
- Sungkawati, E., Prawoto, B., & Mere, K. (2018). *The Business Development Of Women ' S Cooperatives Through Good Corporate Governance And Joint*. 6(4), 27–34.
- Utomo, M. N. (2018). *Implementasi Corporate Governance Dalam Menciptakan Kinerja (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Tarakan)*. 32–42.
- Wahyudin, A., Cahyaningdyah, D., & Baroroh, N. (2014a). Penguatan Sistem Pengendalian Intern (Spi) Sebagai Upaya Meminimalisir Praktek Tidak Sehat Dalam Tata Kelola Keuangan Koperasi. *Rekayasa: Jurnal Penerapan Teknologi Dan Pembelajaran*, 12(2), 132–140.
- Wahyudin, A., Cahyaningdyah, D., & Baroroh, N. (2014b). Penguatan Sistem Pengendalian Intern (Spi) Sebagai Upaya Meminimalisir Praktek Tidak Sehat Dalam Tata Kelola Keuangan Koperasi. *Rekayasa*, 12(2), 132–140.
- Wahyudin, Titin, A., Gunadi, T., & Elya, R. (2021). *Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Bank Bjb Ziebar Bandung, Jawa Barat) Pendahuluan Good corporate governance atau yang sering disingkat dengan GCG merupakan suatu hal yang*



- mengatur pola hubungan dari perusahaan untuk mencapai kinerja yang maksimal.* 696–701.
- Waluyo, (M.Si.). (2007). *Manajemen publik: konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah*. Mandar Maju.
- Widodo, J. (2011). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: *Insan Cendekia*.
- Wijayanti, A. K., & Utomo, M. N. (2017). *Kajian Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance (Studi Pada Koperasi-Koperasi Di Kota Tarakan)*. *Ekonomika*, 8(1), 1–22.
- Wuryani, E., & Yanthi, M. D. (2020). *Determining Factors of Corporate Governance in Women Corporative of East Java Indonesia*. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.26740/jaj.v11n2.p136-148>
- Yanti, D., Yuliachtri, S., Agusria, L., Asiati, D. I., & Savitri, E. (2022). *Pelatihan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dan Laporan Keuangan Koperasi Riding*. 5, 224–229.
- Yudihartanti, Y., Natarsyah, S., & Arnie, R. (2017a). *Kinerja Akuntabilitas Koperasi Aspek*. 6(2), 91–96.
- Yudihartanti, Y., Natarsyah, S., & Arnie, R. (2017b). *Rancangan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Akuntabilitas Koperasi Aspek Organisasi*. *Jurnal Simantec*, 6(2).
- Yusma, L. N. S., Sakti, D. P. B., & Furkan, L. M. (2021). *Tata Kelola Koperasi Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam)*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2).